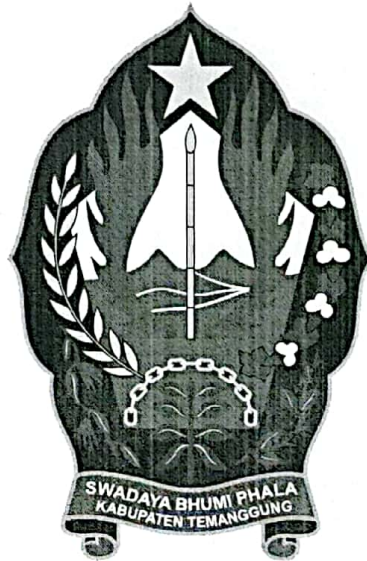


**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN,  
DAN ASET DAERAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>6</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	6
<b>BAB III</b>	<b>7</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>7</b>
Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	7
Pendapatan - LRA	7
Belanja	11
Pendapatan - LO	12
Beban	14
Aset	15
Kewajiban	21
Ekuitas Dana	22
Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	23
<b>BAB IV</b>	<b>23</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>23</b>
<b>BAB V</b>	<b>27</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>27</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 4);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 1.3 Sistematisa Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD  
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021, secara sistematis terdiri dari:
- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD  
BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD  
BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD  
BAB V : PENUTUP

## **BAB II**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**

- 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD  
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri Belanja Daerah Rp 425.701.772.156 dari anggaran Rp 431.726.350.672 atau penyerapan 98,60 % sehingga dapat dikatakan kinerja yang efektif dan efisien.
- Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp 84.546.382.677 dari yang ditargetkan sebanyak Rp 78.871.979.682 dengan pencapaian sebanyak 107,19 %. Faktor pendorong tercapainya target :
- Pendapatan di BPHTB meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
  - Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.
- 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan  
Kendala tidak ada. karena target kinerja telah terlampaui.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD
- Pendapatan - LRA
- Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 3 jenis yaitu sebagai berikut:

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2021			Realisasi (Rp) Tahun 2020
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	78.871.979.682	84.546.382.677	107,19	47.918.648.632
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.541.799.707.448	1.537.846.595.458	99,74	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	70.088.239.000	70.031.052.000	99,92	
	JUMLAH	1.690.759.926.130	1.692.424.030.135	100,10	47.918.648.632

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.692.424.030.135 atau 0,10% lebih tinggi dari target sebesar Rp1.690.759.926.130. Hal ini disebabkan karena : Kontribusi dari Pendapatan Asli daerah terdapat peningkatan sebanyak 107,19 %

Apabila dibandingkan pendapatan tahun 2020 sebesar Rp 47.918.648.632 maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar 3431,87% dimana pada tahun 2021 terdapat pendapatan transfer sebesar Rp 1.537.846.595.458 yang menyumbang 3209,29% dari kenaikan tersebut. Adapun realisasi pendapatan tahun 2021 sebagai berikut:

3.1.1.a      **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tahun 2021			Realisasi (Rp) Tahun 2020
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	PAJAK DAERAH				

	Pajak Hotel	170.000.000	165.229.973	97,19	170.636.594
	Pajak Restoran	1.150.000.000	2.125.018.457	184,78	1.916.160.155
	Pajak Hiburan	12.000.000	14.158.750	117,99	39.936.150
	Pajak Reklame	500.000.000	832.726.326	166,55	519.430.836
	Pajak Penerangan Jalan	16.500.000.000	17.219.779.238	104,36	15.932.617.325
	Pajak Parkir	100.000.000	101.799.300	101,80	114.054.600
	Pajak Air Tanah	270.000.000	311.626.105	115,42	272.188.236
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	15.132.000.000	15.589.594.933	103,02	12.765.965.103
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.000.000.000	16.472.087.860	137,27	16.156.615.814
2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	19.633.782.917	19.633.082.917	100,00	
3	Lain-lain PAD yang Sah				
	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		255.721.208		
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.251.000.000	1.794.121.622	143,41	
	Jasa Giro	4.802.806.765	737.226.286	15,35	
	Pendapatan Bunga	6.316.890.000	7.208.630.169	114,12	
	Penerimaan atas				



Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000	8.900.000	37,87	
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		137.837.559		
Pendapatan Denda Pajak				
a. PBB P2	10.000.000	21.489.573	214,90	28.524.708
b. Pajak Hotel		14.000		81.000
c. Pajak Reklame				149.760
d. Jatuh Tempo Resto		2.459.616		1.892.089
e. Jatuh Tempo Pajak Parkir		1.216.900		11.454
f. Jatuh Tempo Pajak Air Tanah		623.832		291.473
g. Jatuh Tempo Pajak Hiburan				93.335
h. Lain-Lain (Kelebihan Setor)				
Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000	1.913.038.053	191,30	
JUMLAH	78.871.979.682	84.546.382.677	107,19	47.918.648.632

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 84.546.382.677 atau 7,19% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp78.871.979.682 dan 76,44% lebih tinggi dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp 47.918.648.632. Hal ini disebabkan

- Pendapatan di BPHTB meningkat karena banyaknya pengajuan PTSL dari desa
- Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

### 3.1.1.b PENDAPATAN TRANSFER

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2021			Realisasi (Rp) Tahun 2020
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
	Dana Perimbangan	1.116.057.146.781	1.120.897.599.379	100,43	
	Dana Insentif Daerah (DID)	17.149.213.000	17.149.213.000	100,00	
	Dana Desa	247.881.825.000	247.881.825.000	100,00	
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	Pendapatan Bagi Hasil	121.618.522.667	114.087.366.818	93,81	
	Bantuan Keuangan	39.093.000.000	37.830.591.261	96,77	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.541.799.707.448</b>	<b>1.537.846.595.458</b>	<b>99,74</b>	

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.537.846.595.458 atau 0,26% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.541.799.707.448. Hal ini dikarenakan untuk anggaran Bantuan keuangan Propinsi tidak semuanya desa mengajukan pencairan ke BPKPAD melalui OPD pengampu.

### 3.1.1.c LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

No	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2021			Realisasi (Rp) Tahun 2020
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Pendapatan Hibah				
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam	571.300.000	571.300.000	100,00	

	Negeri/Luar Negeri				
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Lain-lain Pendapatan	69.516.939.000	69.459.752.000	99,92	
	JUMLAH	70.088.239.000	70.031.052.000	99,92	

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 70.031.052.000 atau 0,08% lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 70.088.239.000. dikarenakan pendapatan Hibah dana bos yang ditransfer oleh pemerintah propinsi sebesar Rp.70.031.052.000 (given).

### 3.1.1. Belanja

Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 terdiri dari 4 jenis yaitu sebagai berikut:

No	BELANJA DAERAH	Tahun 2021			Realisasi (Rp) Tahun 2020
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	BELANJA OPERASI				
	a. Belanja Pegawai	12.519.369.103	11.935.340.218	95,33	20.557.908.749
	b. Belanja Barang dan Jasa	5.835.839.345	3.984.624.039	68,28	2.190.014.871
2.	BELANJA MODAL	4.320.000	2.490.000	57,64	610.143.999
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.704.328.802	5.779.500.000	66,40	
4.	BELANJA TRANSFER				
	a. Belanja Bagi Hasil	5.675.400.000	5.656.124.477	99,66	

	b. Belanja Bantuan Keuangan	398.987.093.422	398.343.693.422	99,84	
	JUMLAH	431.728.350.672	425.701.772.156	98,60	23.358.067.619

### 3.1.2.a BELANJA OPERASI

- a. Belanja Operasi dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 18.355.208.448 atau 86,73% dari anggaran sebesar Rp 15.919.964.257
- b. Belanja Modal realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 2.490.000 atau 57,64 % dari anggaran sebesar Rp 4.320.000 untuk pembelian meteran dan pembelian *external hard disk*. (rekening yang tersedia di SIPD untuk barang tersebut ada di rekening modal)

Belanja	Jumlah
Belanja Modal Peralatan Personal Computer (hardisk eksternal merek seagate)	1.650.000
Belanja Modal Alat Ukur Universal (meteran 50 m)	840.000
<b>JUMLAH</b>	<b>2.490.000</b>

- c. Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 5.779.500.000 atau 66,40 % dari total anggaran Rp. 8.704.328.802, bersifat dana cadangan untuk Santunan Kematian bagi masyarakat tidak mampu di kabupaten Temanggung, Dana darurat mendesak dan dalam rangka Percepatan Penanganan pandemi Covid 19.

Belanja	Jumlah
Santunan Kematian	2.373.000.000
Dana Darurat dan Mendesak	1.816.500.000
Tambahan Uang Persediaan	1.275.000.000
Belanja Biaya Karantina	315.000.000
<b>JUMLAH</b>	<b>5.779.500.000</b>

- d. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 398.343.693.422 atau 99,84 % dari total anggaran yang tersedia sebesar Rp

398.987.093.422 adalah penyediaan anggaran belanja bantuan keuangan propinsi atau kabupaten yang pelaksanaan kegiatan ada di beberapa OPD yaitu : Dinpermades, DPUPR, Dinkominfo, Dindikpora, DPRKPLH, Dinbudpar dan DKPPP.

### 3.1.2. Pendapatan - LO

No	Keterangan	2021	2020
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		
	Pajak Hotel - LO	165.229.973	170.636.594
	Pajak Restoran - LO	2.118.757.892	1.926.003.165
	Pajak Hiburan - LO	14.158.750	39.936.150
	Pajak Reklame - LO	837.241.926	514.582.836
	Pajak Penerangan Jalan - LO	17.520.717.057	15.690.267.992
	Pajak Parkir - LO	115.299.300	114.054.600
	Pajak Air Tanah - LO	304.901.620	277.564.655
	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	15.645.355.515	12.916.688.653
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	16.472.087.860	16.156.615.814
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	19.633.082.917	
	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	255.721.208	
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.794.121.622	
	Jasa Giro-LO	737.226.286	
	Pendapatan Bunga-LO	7.208.630.169	
	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	8.900.000	
	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	137.837.559	
	Pendapatan Denda Pajak - LO	72.149.497	74.402.374
	Pendapatan dari Pengembalian-LO	1.913.038.053	
2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO		

	Dana Perimbangan-LO	1.120.897.599.379	
	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	17.149.213.000	
	Dana Desa-LO	247.881.825.000	
	Pendapatan Bagi Hasil-LO	114.087.366.818	
	Bantuan Keuangan	37.830.591.261	
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO		
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	571.300.000	
	Lain-lain Pendapatan-LO	69.459.752.000	
	JUMLAH	1.692.832.104.662	47.880.752.833

### 3.1.3. Beban

No	Keterangan	2021	2020
1.	BEBAN OPERASI	15.588.419.624	22.923.447.677
	Beban Pegawai - LO	11.738.289.982	20.635.436.085
	Beban Barang dan Jasa	3.850.129.642	2.288.011.592
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.340.937.031	1.200.038.910
3.	BEBAN TRANSFER		
	Beban Bagi Hasil	5.656.124.477	
	Beban Bantuan Keuangan	398.343.693.422	
4.	BEBAN TAK TERDUGA	5.779.500.000	
5.	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	1.273.347	
6.	Beban Penyisihan Piutang		42.629.300
	JUMLAH	426.709.947.901	24.166.115.887

Beban BPKPAD pada tahun 2021 sebanyak Rp 426.709.947 naik 1765,71 % dari tahun 2020 sebesar Rp 24.166.115.887 karena beban

Transfer Rp 403.999.817.899 untuk beban bagi hasil dan beban bantuan keuangan serta Beban tak terduga sebesar Rp 5.779.500.000. Sedang beban operasi Tahun Anggaran 2021 Rp 15.588.419.624 dibanding tahun 2020 dengan anggaran Rp 22.923.447.677 menurun sebesar 68 % .

#### 3.1.4. Aset

Komposisi dan nilai saldo Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 28.474.270.447 31 Desember 2021 sebesar Rp 161.609.975.829,28 yang tersaji sebagai berikut

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
A.	ASET LANCAR	161.609.975.829,28	28.474.270.447
1.	Kas dan Setara Kas	126.443.931.705	
	Piutang Pajak Daerah	8.162.612.250,50	7.800.883.299,50
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.410.992.321,08	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.043.777.441	1.995.021.076
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	9.655.879.886	
	Piutang Transfer Antar Daerah	11.002.013.459	
	Piutang Lainnya	2.229.755.707	
	Penyisihan Piutang	-7.567.090.227,30	-5.969.738.012
	Persediaan	228.103.285	80.846.900
B.	INVESTASI JANGKA PANJANG		
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	444.550.711,50	
	Investasi Jangka Panjang Permanen	211.096.593.904,37	
C.	ASET TETAP		
	Tanah	44.485.158.240	97.441.517
	Peralatan dan Mesin	8.157.889.610	8.184.442.010
	Gedung dan Bangunan	25.279.447.251	18.644.625.649
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.120.787.249	260.985.489

	Aset Tetap Lainnya	143.674.500	17.174.500
	Akumulasi Penyusutan	-12.198.117.015,29	-8.078.245.561
D.	ASET LAINNYA		
	Aset Tidak Berwujud	1.030.734.420	1.030.734.420
	Aset Lain-lain	225.430.750	238.866.862
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-984.489.522	-874.495.351
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-225.430.750	-237.593.514
	JUMLAH	441.186205.175,86	23.190.949.283,83

Penjelasan :

a. Kas dan Setara Kas

Kas di BPKPAD Tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Kas dan Setara Kas	126.443.931.705	0
	Kas di Kas Daerah	126.443.931.705	0
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0

Kas di Kas Daerah sebesar Rp. 126.443.931.705 merupakan SILPA BPKPAD Tahun Anggaran 2021.

b. Piutang Pajak

Piutang pajak daerah di BPKPAD kabupaten Temanggung Tahun anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jenis pajak	per 31 Desember 2021	per 31 Desember 2020
Piutang Pajak Daerah	8.162.612.250,50	7.800.883.299,50
Piutang Pajak Restoran	11.307.229,00	17.567.794,00
Piutang Pajak Hiburan	1.325.000,00	1.325.000,00



Piutang Pajak Reklame	66.430.981,50	61.915.381,50
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.587.826.611,00	1.286.888.792,00
Piutang Pajak Parkir	13.500.000,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	8.134.815,00	14.859.300,00
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.607.720,00	5.607.720,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.467.716.226,00	6.411.955.644,00
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	763.668,00	763.668,00

Piutang pajak daerah BPKPAD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 8.162.612.250,50 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Pajak Restoran sebesar Rp 11.307.229,00 merupakan piutang bakso kota cakman yang belum terbayarkan sampai dengan 31 desember 2021 sebesar Rp. 5.588.379. Sedangkan sisanya merupakan piutang atas tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp. 5.718.850
- Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp 1.325.000,00 terdiri dari piutang tahun 2006, 2008 dan 2009.
- Piutang Pajak Reklame sebesar Rp. 66.430.981,50 terdiri dari piutang tahun 2021 sebesar 4.515.600 yang merupakan piutang reklame CV Illo Promotindo, PT Ardaya dan Reffo Advertising yang belum terbayarkan sampai dengan 31 desember 2021. Sedangkan sisanya merupakan piutang atas tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 61.915.381,5
- Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 1.587.826.611,00 merupakan Tagihan bulan Desember 2021 yang harus dibayarkan pada bulan Januari 2022.

- Piutang Pajak Parkir sebesar Rp. 13.500.000,00 merupakan piutang dari Alfamaret se Kabupaten Temanggung.
- Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp. 8.134.815,00 merupakan terdiri dari piutang tahun 2021 dari CV Sumber Anugerah, PT Dharma Satya Nusantara dan PT Sumber Makmur Anugrah yang belum terbayarkan sampai dengan 31 desember 2021.
- Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp. 5.607.720,00 merupakan Piutang pajak bahan galian golongan c dari piutang tahun 2005
- Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp. 6.467.716.226,00 merupakan piutang tahun 2021 sebesar Rp. 229.284.279, pada tahun 2020 sebesar Rp. 127.008.517, dan piutang tahun 2019 sebesar Rp. 130.832.119 serta piutang pelimpahan dari KPP Pratama sejak tahun 2005 s.d tahun 2012 sebesar Rp. 5.570.477.550.
- Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 763.668,00 merupakan Piutang pajak BPHTB dari piutang tahun 2010.

c. Piutang lainnya

Piutang lain lain sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 26.775.328.586,78 dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp. 9.410.992.321,08
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 2.043.777.441,00 terdiri dari Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 2.500.000,00, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp 290.131.760,00 dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Rp1.751.145.681,00
- Piutang Transfer Pemerintah Pusat berupa Piutang Dana Perimbangan sebesar Rp. 9.655.879.886,00

- Piutang Transfer Antar Daerah berupa Piutang Bagi Hasil sebesar Rp 11.002.013.459,00
- Piutang Lainnya sebesar Rp.2.229.755.707,00 terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Rp 1.659.271.665,00 dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp. 570.484.042,00
- Penyisihan Piutang sebesar Rp (7.567.090.227,30) terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan Rp (5.969.738.012,30) dan Penyisihan Piutang Lainnya Rp. (1.597.352.215,00)

d. Persediaan

Persediaan di BPKPAD sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Bangunan dan konstruksi	3.777.675,00
2	Bahan lainnya	1.041.000,00
3	Belanja suku cadang angkutan	21.233.000,00
4	Belanja ATK	35.770.000,00
5	Kertas dan Cover	1.028.500,00
6	Belanja cetak	145.756.808,00
7	benda pos	300.000,00
8	Bahan komputer	16.901.000,00
9	Alat Listrik	389.000,00
10	Perlengkapan dinas	875.000,00
11	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.031.302,00
	jumlah total	228.103.285,00

e. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang di BPKPAD sebesar Rp 211.541.144.615,87 terdiri dari investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir (untuk ternak) yang dikelola

oleh DKPPP sebesar Rp 444.550.711,50 dan Investasi jangka panjang permanen yaitu penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 211.096.593.904,37

f. ASET

Pada Tahun 2021 BPKPAD menjalankan fungsi SKPKD yaitu sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga nilai aset BPKPAD pada tahun 2021 terdapat 2 komponen yaitu Aset BPKPAD sebagai OPD dan Aset BPKPAD sebagai pengelola. Nilai Aset BPKPAD dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Tanah : Nilai aset tanah pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 44.485.158.240,00 yang terdiri dari 2 komponen yaitu Tanah BPKPAD sebagai OPD senilai Rp 97.441.517 dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2020 dan Tanah BPKPAD sebagai Pengelola yang pada awal tahun 2021 senilai Rp 48.507.885.953,00 menjadi Rp 44.387.716.723,00 pada akhir tahun 2021 karena adanya mutasi tanah ke beberapa OPD senilai Rp 4.120.169.230,00.
- Peralatan dan Mesin : Nilai aset peralatan dan mesin pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 8.157.889.610,00 yang terdiri dari 2 komponen yaitu peralatan dan mesin BPKPAD sebagai OPD senilai Rp 8.078.292.010,00 dimana mengalami penurunan dari tahun 2020 senilai Rp 106.150.000,00 yang disebabkan adanya mutasi keluar Rp 107.800.000,00 dan belanja modal senilai Rp 1.650.000,00 dan peralatan dan mesin BPKPAD sebagai Pengelola yang pada awal tahun 2021 senilai Rp 67.515.000,00 menjadi Rp 79.597.600,00 pada akhir tahun 2021 karena adanya mutasi masuk dari beberapa OPD senilai Rp 853.856.600,00 dan mutasi keluar ke beberapa OPD senilai Rp 841.774.000,00.
- Gedung dan Bangunan : Nilai aset Gedung dan Bangunan pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 25.279.447.251,00 yang terdiri dari 2 komponen yaitu Gedung dan Bangunan BPKPAD sebagai OPD senilai Rp

18.644.625.649,00 dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2020 dan aset Gedung dan Bangunan BPKPAD sebagai Pengelola yang pada awal tahun 2021 senilai Rp 6.710.041.602,00 menjadi Rp 6.634.821.602,00 pada akhir tahun 2021 karena adanya mutasi keluar ke DPRKPLH senilai Rp 75.220.000,00.

- Jalan, Irigasi dan Jaringan : Nilai aset Jalan, irigasi dan jaringan pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 2.120.787.249,00 yang terdiri dari 2 komponen yaitu Jalan, irigasi dan jaringan BPKPAD sebagai OPD senilai Rp 260.985.489,00 dan aset Jalan, irigasi dan jaringan BPKPAD sebagai Pengelola senilai Rp 1.859.801.760,00 dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.
- Aset Tetap Lainnya : Nilai aset tetap lainnya pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 143.674.500,00 yang terdiri dari 2 komponen yaitu aset tetap lainnya BPKPAD sebagai OPD senilai Rp 17.174.500,00 dan aset tetap lainnya BPKPAD sebagai Pengelola senilai Rp 126.500.000,00 dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.
- Aset Tidak Berwujud : Nilai Aset Tidak Berwujud pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 1.030.734.420,00 dimana tidak mengalami perubahan dari tahun 2020.
- Aset Lain-lain : Nilai aset lain-lain pada BPKPAD di tahun 2021 sejumlah Rp 225.430.750,00 dimana aset senilai Rp 4.390.750,00 merupakan aset lain-lain BPKPAD sebagai pengelola, pada tahun 2021 aset tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu senilai Rp 17.826.862,00 dikarenakan adanya penghapusan aset.

### **3.1.5. Kewajiban**

#### **1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang menjadi tanggungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp 0.

#### **2. Utang Jangka Pendek Lainnya**

- Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang belanja yang menjadi tanggungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah sebagai OPD per 31 Desember 2021 sebesar Rp 768.011.108 dengan perincian sebagai berikut:

NO	Uraian	Jumlah
1.	Tambahan Penghasilan PNS bulan Desember 2021	175.941.500
2.	Insentif pemungutan pajak daerah Triwulan IV	515.950.000
3.	Honor Pegawai Tidak Tetap	58.800.000
4.	Jasa Kantor	17.319.608
Jumlah		768.011.108

3. Kewajiban jangka pendek BPKPAD selaku SKPKD per 31 Desember 2021 sebesar Rp 12.063.836.615,46 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan diterima dimuka berupa setoran kelebihan pembayaran dari pihak ke III sebesar Rp 1.621.799.998,46, Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.985.807.111,00, Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp 7.692.218.398,00, Utang Kelebihan Pembayaran PAD sebesar Rp 7.692.218.398,00 dan utang belanja sebesar Rp 2.753. 818.219 terdiri dari :

Utang Belanja	2.753.818.219,00
Utang Belanja Pegawai	691.891.500,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	76.119.608,00

### 3.1.6. Ekuitas Dana

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1.	Ekuitas Awal	20.252.002.817	230.414.669.980
2.	Surplus / (Defisit) LO	1.266.122.067.549,74	23.714.636.946
3.	Ekuitas	338.266.910.793	-209.316.723.096
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	-1.175.270.609.782	-24.560.581.013

5.	Ekuitas Akhir	429.118.457.771	20.252.002.816
----	---------------	-----------------	----------------

- 3.1. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung .

## **BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

### **A. Domisili dan bentuk hukum**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

### **C. Dasar Hukum Operasional Kegiatan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

### **D. Pejabat Struktural selama tahun berjalan-**

Pada akhir tahun 2021, susunan Pejabat Eselon III & Eselon IV sebagai berikut :



No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
1	Eselon III/a	SEKRETARIS	HUSEIN TSANI UBADDILLAH, SE, M.Si
2	Eselon III/b	KEPALA BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.
3	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	YUSI SUSANTI, SIP, MM
4	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM
5	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
6	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	EKO BUDI PRAYITNO, S.Sos, M.AP, M.Sc

7	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN	AMBAR SAPTA KURNIAWATI, SE,M.Si
8	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI	ZIADATUN NI'MAH, SE, M.Acc.
9	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NELY NIAMAH HANI, S.Sos,MM
10	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	SIH UTAMI SE
11	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	QOIDATUN N SETIANINGSIH
12	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	SRI INTARTI
13	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA	LUTFI AMALIYAH, SE
14	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN	TATAG WAHYUDI, S.Sos

15	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	EKO MEDISUSANTO SUWIYANTANA, ST, MM
16	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN	SAKSANA ARIFIYANTO, S.ST
17	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	KARTINI YOGANINGSIH, SE MM
18	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si
19	Eselon IV/a	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	FERRY WISNUCAHYO B, SE, MM
20	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN BARANG MILIK DAERAH	STALIS KURNIAWAN, S.Sos
21	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN & PELAPORAN PENDA	SUMARNA, S.Sos

22	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	ISKAK, SE
----	----------------	---	-----------

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memerlukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang dilaksanakan selama Tahun anggaran 2021 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi maupun dalam teknik pelaksanaannya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Salaku  
Pejabat Renggang Anggaran/Barang



TRI WINARNO, SE, MM. X

Pejabat Tingkat I

NIP : 197310201999031005